

# SEKURITISASI TIKTOK DI AMERIKA SERIKAT DI MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP PADA TAHUN 2020

Rahmadhaniah Putri Ichwan<sup>1</sup>, Rizki Dian Nursita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Hubungan Internasional. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

<sup>1</sup>[rpichwan@gmail.com](mailto:rpichwan@gmail.com), [rizki](mailto:rizki), <sup>2</sup>[dian.nursita@uui.ac.id](mailto:dian.nursita@uui.ac.id)

## ***Abstract***

*Donald Trump issued a policy to ban the use of the application made in China with suspicions of theft of personal data of US citizens of TikTok users and as a first step in protecting national security. Fears of data theft and espionage that Donald Trump assumes will be channeled to the Chinese government—particularly by the Chinese Communist Party, are threatening TikTok to no longer operate in the United States. Trump's speech act to the media and his statement on August 6, 2020 at the White House became the first step in America's national emergency in banning TikTok in the US. However, there have been some discussions and considerations between TikTok and Donald Trump and the US government, especially with the US Department of Commerce and the Secretary of State. By using securitization theory, the author analyzes the steps taken by Trump regarding the problems he faces. The provisional argument against this case is that Trump banned TikTok to protect his national security, especially data and at the same time cover up his campaign failure in Tulsa, Oklahoma. There is also an assumption that Trump will buy TikTok not only for reasons of national security but in order to be able to control the work of the application and have algorithm technology that is the key to the success of the application.*

**Keywords:** *United States, ByteDance, Securitization, TikTok, China*

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah cara para aktor dalam mengambil keputusan serta pembuatan kebijakan. Seiring perkembangan era digital hingga adanya kemunculan media baru, yaitu sebuah perangkat media yang timbul dari efek inovasi teknologi di bidang media yang didalamnya meliputi televisi kabel, satelit, teknologi optik fiber dan komputer (Kurnia 2005, 292), ikut membentuk sebuah kelompok masyarakat baru yaitu masyarakat informasi yang sesuai dengan pendapat Mc Quail:

*‘dependent upon complex electronic information and communication network and which allocate a major portion of their resources to information and communication activities’* (Kurnia 2005, 293).

Kehadiran media baru serta masyarakat informasi menjadi 2 komponen yang memperlancar pergerakan dunia internasional dalam pertukaran informasi, merespon isu dan melakukan sebuah tindakan dan lain sebagainya. Media sosial menjadi salah satu dari media baru. Media sosial sering menjadi sarana untuk setiap orang untuk mencari, memperoleh, dan memanfaatkan informasi yang tersedia dalam kebebasan berkomunikasi (Susanto 2017, 386). Di era digital ini masyarakat pun menggunakan media sosial sebagai alat perwujudan freedom from speech. Dan media baru ini dikuasai oleh unit terkecil negara yaitu masyarakat dari berbagai kalangan.

Namun apabila media sosial ini tidak digunakan dengan bijak akan menimbulkan permasalahan, disinformasi, kesalahpahaman hingga mengancam keamanan negara khususnya data pribadi pengguna media sosial yang dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga.

Di masa pemerintahan Donald Trump terdapat pelarangan menggunakan aplikasi TikTok. ByteDance selaku perusahaan yang menaungi TikTok merupakan salah satu perusahaan teknologi multinasional dari Tiongkok yang berpusat di Beijing. Pada Agustus 2020, AS akan melarang TikTok sepenuhnya dikarenakan keberadaannya diklaim mengancam keamanan, terutama mengancam keamanan data pribadi masyarakat AS. Namun dari pihak TikTok sendiri menyangkal hal tersebut dan menyatakan bahwa data pengguna AS dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Data yang tersimpan pun berlokasi di luar Tiongkok dengan tujuan agar data pengguna AS tidak tersimpan bersama dengan data pengguna diluar AS.

TikTok pun terancam dilarang di AS dengan alasan keamanan dan permasalahan ini naik diawali dengan adanya *speech act* yang dilakukan oleh Donald Trump dan Departemen Perdagangan AS hingga Sekretaris Negara Mike Pompeo bahwa TikTok akan mengancam keamanan nasional mulai dari ekonomi hingga kebijakan luar negeri AS. TikTok menyangkal tuduhan tersebut karena tidak adanya bukti kuat atas tuduhan tersebut, terutama atas tuduhan pemberian data yang dimiliki ByteDance ke pemerintahan Tiongkok.

Dalam tulisan ini saya akan membahas faktor tindakan Amerika Serikat yang melakukan tindakan pelarangan aplikasi media TikTok dengan asumsi ancaman keamanan serta tindakan yang dilakukan oleh aktor negara dan non negara dalam menangani kasus ini di masa Pemerintahan Donald Trump.

### **Kerangka Pemikiran**

Teori Sekuritisasi muncul dari pemikiran tiga tokoh yaitu Bary Buzan, Ole Wæver dan Japp de Wild kemudian sekuritisasi dikembangkan oleh pakar yang tergabung dalam Mazhab

Kopenhagen (Copenhagen School). Di dalam buku yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis* di tahun 1998, sekuritisasi memberikan kacamata baru terhadap adanya dua pandangan yang berbeda dari dua kelompok; kelompok yang melihat ancaman secara subjektif dan kelompok yang melihat ancaman secara objektif (Wilde et al. 1998, 30). Dengan adanya perbedaan ini, Copenhagen School menyatakan jika suatu masalah tidak harus menjadi sebuah masalah untuk keamanan dikarenakan adanya ancaman eksistensial yang nyata, namun karena masalah tersebut diperlihatkan dan ditetapkan oleh aktor utama—pemerintah atau pejabat negara sebagai sebuah ancaman. Dengan kata lain, bagaimana masalah tersebut dapat dikonstruksi secara sosial sebagai sebuah ancaman. Buzan menyatakan terdapat 3 langkah sekuritisasi yang berhasil mencegah masalah sekuritisasi, yaitu;

1. Mengidentifikasi masalah atau ancaman eksistensial
2. Tindakan/respon darurat
3. Pengaruhnya terhadap hubungan antar pihak atau unit yang terlibat dengan melanggar aturan (Wilde et al. 1998,26)

*Speech act* menjadi sebuah kunci utama dari sekuritisasi. Sehingga teori atau pandangan atau perspektif ini memberikan pandangan yang luas bagi para peneliti mengenai keamanan dengan menyatukan unsur keamanan tradisional (keamanan negara) dan unsur keamanan non tradisional (keamanan manusia) (Hadiwinata 2017, 3)

Pandangan sekuritisasi ini merubah sikap aktor yang terlibat untuk melakukan tindakan diluar batas atau agresif dan komprehensif untuk mempertahankan posisi dan keberlangsungan. Keamanan saat ini dilihat tidak dilihat dari ancaman militer seperti pandangan tradisional namun berkembang lebih luas terutama dalam bidang

teknologi informasi dan komunikasi khususnya yang dapat mengancam data pribadi hingga data rahasia negara. Sehingga hal ini bukan lagi menjadi sebuah masalah keamanan politik biasa namun sudah berada di tingkat ancaman keamanan politik darurat.

Kemajuan teknologi dengan tidak adanya batas atas hadirnya globalisasi dan *network* tentu akan sulit bagi negara untuk mengontrol aktifitas warga negaranya dalam mengakses teknologi dan media baru seperti media sosial. Sehingga salah satu cara bagi negara untuk membendung ancaman tersebut adalah menutup akses secara keseluruhan dengan memblokir atau melarang media baru yang dirasa mengancam keamanan negara dan masyarakat.

## **Diskusi dan Pembahasan**

### **Latar Belakang TikTok**

TikTok awalnya merupakan aplikasi yang tidak berdiri sendiri. TikTok merupakan gabungan dan perkembangan dari aplikasi video singkat Musical.ly yang sudah populer sebelumnya pada tahun 2016. Pada November 2017, Musical.ly diakuisisi oleh ByteDance dan TikTok diluncurkan. Kepopuleran TikTok terbukti pada Mei 2018 bahwa firma riset pasar Sensor Tower menyatakan TikTok adalah aplikasi iOS non-game yang paling banyak diunduh dalam 3 bulan pertama dan di bulan Agustus 2018 ByteDance menyatakan akan menutup total Musical.ly dan akan beralih ke TikTok (Kelion 2020). Setelah akuisisi tersebut, akun pengguna Musical.ly sebelumnya akan otomatis pindah ke aplikasi TikTok.

Peralihan Musical.ly ke TikTok menjadi sebuah langkah besar dan sukses bagi ByteDance karena kesuksesan yang meningkat. TikTok resmi dirilis pada September 2016 dan menuai banyak atensi dari pengguna individu. Douyin, TikTok versi Tiongkok, terdapat 150 juta

pengguna aktif dari 500 juta pengguna yang ada (Kusumawardhani and 22 Sari 2021, 23). Kunci kesuksesan aplikasi TikTok adalah kemudahan dalam penggunaannya dan m terdapat istilah FYP (*For Your Page*) yang menampilkan saran-saran video yang menarik untuk ditonton di fitur home sesuai dengan video yang sering ditonton dan *likes* oleh pengguna. TikTok merupakan aplikasi yang dapat didownload gratis dan terdapat fitur berbayar seperti iklan, emoji dan stiker.

### **Langkah Sekuritisasi**

Isu pelarangan TikTok di Amerika Serikat ini dapat diklasifikasikan sebagai sebuah permasalahan atau isu yang subjektif karena dalam teori sekuritisasi yang dinyatakan oleh Copenhagen School bahwa ancaman bagi keamanan tidak harus karena hadirnya ancaman yang nyata atau eksistensial, namun karena dipaparkan atau dinyatakan oleh agen kunci—yaitu pemerintah dan dikonstruksi secara sosial sebagai sebuah ancaman. Maka dari deskripsi tersebut, dapat dibuktikan bahwa tindakan *speech act* pelarangan TikTok yang dilakukan Donald Trump merupakan langkah awal dan utama dalam tindakan sekuritisasi.

Seorang aktor atau *key of agent* harus melakukan sebuah aksi yang menyatakan secara resmi bahwa isu yang diangkat merupakan sebuah ancaman sekuritisasi, sehingga *speech act* yang dilakukan oleh *key of agent* harus memenuhi 3 kriteria, yaitu;

1. Objek referensi secara eksistensial terancam
2. Menuntut hak untuk melakukan tindakan darurat
3. Aktor utama meyakinkan audiens untuk memvalidasi tindakan darurat tersebut—yang mana aturan standar di luar atau

perilaku melanggar aturan untuk melawan ancaman itu dibenarkan (Kartasmita and Kurnadi 2020, 168-169).

Sementara itu, dalam teori sekuritisasi, Buzan menyatakan terdapat 3 langkah sekuritisasi yang berhasil dalam mencegah sebuah masalah sekuritisasi, yaitu;

1. Mengidentifikasi masalah atau ancaman eksistensial;
2. Tindakan/respon darurat; dan
3. Pengaruhnya terhadap hubungan antar pihak atau unit yang terlibat dengan melanggar aturan (Wilde et al. 1998, 26)

Buzan menyatakan bahwa secara tradisional, dengan menyatakan 'keamanan', seorang perwakilan negara menyatakan sebuah keadaan darurat dengan demikian ia dapat menuntut hak untuk menggunakan cara apapun yang diperlukan memblokir perkembangan yang mengancam (William 2011).

Tindakan AS terhadap TikTok dapat dipahami karena networking, internet dan cyberspace berkembang sangat pesat di era digital saat ini terutama di bidang komunikasi dan e-commerce. Dan kedua hal tersebut termasuk dalam infrastruktur kritis. Infrastruktur kritis adalah beberapa sektor dasar yang penting dan krusial bagi sebuah negara untuk berdiri di peradaban modern seperti pertanian, distribusi makanan, perbankan, perawatan kesehatan, transportasi, air dan jaringan listrik (Singer and Friedman 2014, 15).

Hadirnya TikTok memberikan urgensi kepada AS dan menghindari kemungkinan terburuk yang terjadi. Karena sudah dijelaskan sebelumnya, dalam praktik, masalah keamanan tidak harus karena ancaman eksistensial yang nyata namun karena masalah tersebut dinyatakan sebagai ancaman (Wilde et al. 1998, 24).

Sekuritisasi pun memberikan pandangan baru: kelompok yang melihat ancaman itu merupakan hal yang subjektif (ancaman nyata), dan kelompok lainnya yang melihat ancaman itu secara objektif (ancaman yang dirasakan) (Wilde et all 1998, 30).

Aktor yang mengidentifikasi sebuah isu menjadi isu keamanan disebut *securitizing actors* yang didefinisikan sebagai seseorang yang mengamankan masalah dengan menyatakan—objek referensi—terancam secara eksistensial (Ross 2014). Dalam kasus ini, objek eksistensial adalah negara dan masyarakat, yakni AS dan masyarakat AS. Tindakan sekuritisasi yang dilakukan Trump sesuai dengan teori sekuritisasi menurut Buzan dapat diuraikan sebagai berikut;

Mengidentifikasi masalah atau ancaman eksistensial	Tindakan/respon darurat	Pengaruhnya terhadap hubungan antar pihak atau unit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juli 2020: Mike Pompeo selaku Sekretaris Negara bersama Presiden Donald Trump menyatakan di berbagai media bahwa TikTok memiliki kemungkinan akan dilarang di Amerika Serikat</li> <li>• 6 Agustus 2020: Lewat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agustus 2020: Microsoft dan Oracle mulai melakukan pendekatan dengan ByteDance dan bersiang untuk mengakuisisi atau mengoperasikan TikTok</li> <li>• 6 Agustus 2020: Juli 2020: Mike Pompeo selaku Sekretaris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 Agustus 2020: TikTok mengajukan keluhan akan ancaman pemblokiran TikTok ke pengadilan federal dan menantang upaya Adminitrasi untuk melarang TikTok di AS</li> </ul>

Sekuritisasi TikTok Di Amerika Serikat Di Masa Pemerintahan Donald Trump Pada Tahun 2020

<p>website White House, Presiden Trump mengeluarkan Perintah Eksklusif dan menyatakan bahwa TikTok merupakan ancaman keamanan nasional dan akan melarang berbagai transaksi TikTok dengan batas waktu 45 hari</p>	<p>Negara bersama Presiden Donald Trump menyatakan di berbagai media bahwa TikTok memiliki kemungkinan akan dilarang di Amerika Serikat</p> <p>• 12 Mei 2021: Senator John Hawley menyatakan Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan Senat dengan suara bulat mengesahkan UU yang melarang pengunduhan aplikasi TikTok ke perangkat pemerintahan AS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 September 2020: Dalam website resmi Microsoft menyatakan bahwa ByteDance tidak akan menjual operasi TikTok AS ke Microsoft</li> <li>• 19 September 2020: Website resmi Oracle menyatakan bahwa mereka terpilih menjadi penyedia Cloud Aman untuk TikTok</li> <li>• 21-22 September 2020: Terdapat perbedaan pandangan terkait kesepakatan yang ada sehingga menimbulkan</li> </ul>
---	---	--

		perselisihan dan kendala dalam melakukan persetujuan
--	--	--

**Langkah pertama, mengidentifikasi masalah sebagai ancaman keamanan.** Trump menyatakan dalam berbagai wawancara dan konferensi bahwa TikTok menjadi sumber kekhawatiran atas ancaman keamanan nasional dan mengancam data pribadi masyarakat AS yang diperkirakan dapat diakses oleh pemerintahan Tiongkok dibawah perjanjian antara perusahaan dan pemerintah.

Sebelumnya pada Pada tanggal 5 Agustus 2020, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengumumkan program Clean Network Program yang bertujuan untuk menjalankan gerakan anti-China untuk menyingkirkan dominasi teknologi Tiongkok dari AS. Dengan program ini, akan dilakukan pencabutan seluruh operator telekomunikasi Tiongkok, layanan cloud, aplikasi, toko aplikasi hingga kabel bawah laut. Kebijakan ini memberikan jalan yang lebih luas kepada inisiatif Clean Path Program 5G Gedung Putih untuk melarang perusahaan perangkat keras Tiongkok seperti Huawei dan ZTE serta tidak dapat beroperasi lagi dalam infrastruktur telekomunikasi AS (Kartasasmita and Kurnadi 2020, 173). Semua upaya ini dilakukan dengan maksud untuk “menjaga privasi warga AS dan informasi paling sensitif dari gangguan agresif oleh aktor lawan seperti Partai Komunis Tiongkok (Kartasasmita and Kurnadi 2020, 173).

Hingga pada tanggal 6 Agustus di website trumpwhitehouse.com, Trump mengeluarkan *emergency economic powers* atau *executive order* untuk mengambil langkah-langkah tambahan untuk menangani keadaan

darurat nasional sehubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi serta rantai pasokan layanan yang dinyatakan dalam Perintah Eksklusif 13873 yang tertinggal 15 Mei 2019. Pengeluaran Perintah Eksklusif terkait pelarangan TikTok ini berdasarkan *International Emergency Economic Powers Act (50 USC 1701 et seq.) (IEEPA)*, *National Emergencies Act (50 USC 1601 et seq.)*, dan bagian 301 dari judul 3, *United States Code* sebagai bentuk tindakan kewaspadaan akan pencurian data yang diasumsi dilakukan oleh TikTok dan memungkikan Parta Komunis Tiongkok untuk mengakses informasi pribadi dan hak milik AS—berpotensi melacak lokasi karyawan dan kontraktor federal, membuat berkas pribadi untuk pemerasan dan melakukan spionase perusahaan (The White House 2020). Tidak hanya itu, aplikasi TikTok yang semakin menjamur di AS juga dikhawatirkan akan mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri dan ekonomi Amerika Serikat (The White House 2020). Trump menyatakan:

*“TikTok automatically captures vast swaths of information from its users, including Internet and other network activity information such as location data and browsing and search histories. This data collection threatens to allow the Chinese Communist Party access to Americans’ personal and proprietary information — potentially allowing China to track the locations of Federal employees and contractors, build dossiers of personal information for blackmail, and conduct corporate espionage.”*  
(The White House 2020).

Trump juga menyatakan bahwa TikTok ini akan mengancam keamanan. Kebijakan luar negeri dan ekonomi AS;

*“Specifically, the spread in the United States of mobile applications developed and owned by companies in the People’s Republic of China (China) continues to threaten the national security, foreign policy, and economy of the United States. At this time, action must be taken to*

*address the threat posed by one mobile application in particular, TikTok.” (The White House 2020).*

Isu ini menjadi cukup unik dimana perusahaan bukan menjadi aktor utama yang perlu dihadapi oleh ByteDance untuk bersaing dan melakukan ekspansi, namun pemerintah AS. Dikutip dari CNN Business, petinggi seperti pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer dan Senator Republik Arkansas Tom Cotton menghimbau komunitas intelijen untuk mengukur dan menilai risiko dan 33 kemungkinan-kemungkinan yang diakibatkan oleh meluasnya TikTok di AS terhadap keamanan nasional. Namun seluruh pernyataan dan tuduhan tersebut dianggap sebagai “tuduhan tidak berdasar”. Dan untuk menyatakan bahwa mereka merupakan perusahaan yang terindependensi dari Tiongkok dan mengutip CEO Amerika yang telah direkrut sebelumnya dan menyatakan bahwa mereka “tidak pernah memberikan data pengguna (pengguna AS) ke pemerintah Tiongkok, dan tidak akan melakukan hal tersebut apabila diminta” (Fung 2020).

**Langkah kedua, melakukan tindakan/respon darurat.** Setelah speech act yang dilakukan oleh Donald Trump dan beberapa petinggi AS lainnya bahwa TikTok merupakan ancaman nyata keamanan nasional, terdapat beberapa cabang militer AS dan lembaga Administrasi Keamanan Transportasi dan Angkatan Darat AS melarang personel mereka untuk menggunakan TikTok (Finnegan, Thorbecke, and Yiu 2020). Departemen Keamanan Dalam Negeri, Administrasi Keamanan Transportasi dan Angkatan Bersenjata AS melarang penggunaan TikTok di telepon Pemerintahan Federal. Senator John Hawley yang berasal dari Partai Republik Missouri menyatakan dalam pers selaku sponsor RUU bahwa Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan Senat dengan suara bulat mengesahkan UU yang akan melarang pekerja federal AS

untuk mengunduh aplikasi TikTok ke perangkat pemerintahan AS (Bartz 2021).

Perusahaan dan organisasi Amerika pun mulai melarang penggunaan TikTok di perangkat mereka. Hal ini telah disampaikan oleh Trump dalam pidatonya yang dinaskahkan dipublikasi di website White House:

*“These risks are real. The Department of Homeland Security, Transportation Security Administration, and the United States Armed Forces have already banned the use of TikTok on Federal Government phones...”*

*“American companies and organizations have begun banning TikTok on their devices. The United States must take aggressive action against the owners of TikTok to protect our national security.” (The White House 2020).*

Tidak hanya itu, Trump menyatakan berbagai transaksi yang dilakukan oleh ByteDance akan dilarang selama 45 hari dan dalam 45 itu juga Sekretaris Perdagangan harus mengidentifikasi transaksi yang ada:

*Section 1. (a) The following actions shall be prohibited beginning 45 days after the date of this order, to the extent permitted under applicable law: any transaction by any person, or with respect to any property, subject to the jurisdiction of the United States, with ByteDance Ltd. (a.k.a. Zijié Tiàodòng), Beijing, China, or its subsidiaries, in which any such company has any interest, as identified by the Secretary of Commerce (Secretary) under section 1(c) of this order.*

*(b) The prohibition in subsection (a) of this section applies except to the extent provided by statutes, or in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding*

*any contract entered into or any license or permit granted before the date of this order.*

*(c) 45 days after the date of this order, the Secretary shall identify the transactions subject to subsection (a) of this section. (The White House 2020).*

**Langkah ketiga, pengaruhnya terhadap hubungan antar pihak atau unit yang terlibat dengan melanggar aturan.** Tindakan pelarangan TikTok ini memberikan keresahan bagi pengguna TikTok di AS karena akan mempersempit ruang mereka dalam kebebasan berpendapat atau *right from speech*. Tiongkok pun dikritik karena dianggap tidak etis dan perencanaan industrinya dipimpin oleh pemerintah yang menegakkan transfer teknologi. Tuduhan lainnya adalah Tiongkok telah memanfaatkan teknologi untuk mendukung rezim otoriternya dan kemajuan Tiongkok dalam sains dan teknologi akan merugikan kepentingan nasional dan ketertiban regional AS (Hayoung 2019, 2). Asumsi tindakan pencurian data dan kontrol teknologi oleh pemerintahan Tiongkok dapat termasuk kategori pelanggaran aturan akan privasi negara.

Tidak hanya itu, TikTok menilai Perintah Eksklusif yang dikeluarkan Administrasi dibawah International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), tidak mengikuti proses hukum dan gagal memberikan bukti nyata bahwa TikTok merupakan ancaman nyata atau pembenaran atas tindakan hukumannya yang menuduh TikTok sebagai ancaman keamanan nasional. Pernyataan dan tindakan akan memblokir Tiktok ini juga telah melanggar perlindungan proses hukum Amandemen Kelima.

Pada 24 Agustus 2020 TikTok angkat bicara dan mengatakan tidak setuju akan tuduhan tersebut karena dapat mencabut hak-hak komunitas. Mereka menyangkal tuduhan tersebut dikarenakan

terdapat beberapa usaha dan tindakan luar biasa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin kepercayaan pengguna AS. Tindakan luar biasa tersebut adalah penyimpanan data yang disimpan di luar Tiongkok (di Amerika Serikat dan Singapura) serta membangun penghalang perangkat lunak yang membantu TikTok menyimpan data secara terpisah dari pengguna produk ByteDance lainnya demi menjamin perlindungan privasi dan keamanan pengguna TikTok. Hal ini pun sudah diketahui oleh pemerintah AS. Personil utama yang bertanggung jawab dalam melayani pasar TikTok termasuk CEO, Kepala Keamanan Global hingga Penasihat Umum, keseluruhan adalah orang Amerika yang berbasis di AS dan tidak tunduk kepada hukum Tiongkok. Moderasi konten AS pun dipimpin oleh perusahaan yang berbasis di AS, tim beroperasi secara independen dan server pun terpisah dari Tiongkok—yang mana berlokasi di AS dan Singapura (TikTok Company 2020).

Dari pernyataan TikTok dikatakan juga di tahun 2019, CFIUS (The Committee on Foreign Investment in the United States) melakukan kegiatan tinjauan akuisisi ByteDance dengan Musical.ly meskipun Musical.ly yang berbasis di Tiongkok memiliki aset yang terbatas di AS. Tinjauan yang dilakukan dinilai ganjal karena ByteDance telah melakukan akuisisi terhadap Musical.ly di tahun 2017 dan telah meninggalkan sebagian aset terbatas Musical.ly di AS pada saat penjangkauan CFIUS di tahun 2019. Dalam peninjauan tersebut, ByteDance memberikan banyak dokumentasi dan informasi sebagai tanggapan atas pertanyaan dari CFIUS serta mengirimkan dokumen terperinci terkait langkah-langkah keamanan TikTok untuk memastikan data pengguna AS dilindungi dalam penyimpanan dan tidak dapat diakses oleh pihak manapun. CFIUS tidak mengklarifikasi apapun terkait mengapa tindakan keamanan TikTok tidak memenuhi dalam mengatasi masalah keamanan nasional. Pada 30 Juli 2020, Komite mengeluarkan surat yang menyatakan CFIUS mengidentifikasi adanya risiko keamanan nasional yang timbul dari

transaksi dan belum mengidentifikasi langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi resiko tersebut (TikTok Company 2020).

Dalam kasus pelarangan TikTok sendiri, terdapat kekhawatiran bahwa pelarangan nanti akan mempengaruhi gaji karyawan yang bekerja di TikTok dan berpotensi akan melanggar hak mereka terkait kesejahteraan pekerja. Hal ini berawal dari pengajuan di Pengadilan Distrik California Utara bahwa mereka telah mengirimkan jaminan kepada Patrick Ryan, penggugat dalam gugatan, bahwa perintah yang dilayangkan Trump untuk pelarangan TikTok tidak bermaksud untuk mempengaruhi gaji hingga tunjangan karyawan. Dalam pengajuan dikatakan Departemen Perdagangan tidak bermaksud untuk menerapkan Perintah Eksklusif 13942 dengan melarang pembayaran upah dan/atau gaji kepada penggugat atau karyawan atau kontraktor lainnya (Musil 2020)

### **Tiktok sebagai Ancaman bagi AS**

Dalam lingkup isu keamanan, Buzan mengelompokkan dalam 5 sektor yang tiap sektornya mengidentifikasi interaksi yang ada, yakni (Wilde et al. 1998, 7-8):

- a. Sektor politik (status pemerintahan, pengakuan, otoritas)
- b. Sektor ekonomi (finansial, perdagangan, dan produksi)
- c. Sektor lingkungan (aktivitas manusia dan *the planetary biosphere*)
- d. Sektor militer (forceful coercion) e. Sektor sosial (*collective identity*)

Dalam kacamata sekuritisasi, isu ini dapat dilihat dari sektor politik dan sektor ekonomi. Menurut Buzan, dalam menetapkan

sektor-sektor dalam analisis keamanan, terdapat salah satunya adalah ekonomi dan politik. Ia menyatajab bahwa keamanan ekonomi adalh kekhawatiran akan akses sumber daya, keuangan dan pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang dapat diterima serta keamanan politik adalah kekhawatiran akan stabilitas organisasi negara, sistem pemerintahan dan ideologi yang memberikan mereka legitimasi (Wilde et al. 1998, 8).

Penyebab utama terjadinya perang teknologi yang dilakukan oleh pemerintahan Trump kepada Tiongkok dikarenakan oleh beberapa faktor yakni perbedaan nilai yang dimiliki oleh antara Tiongkok dan AS yakni dalam nilai-nilai politik, pengejaran geopolitik hingga persaingan mereka di arena regional dan global (Hayoung 2019, 2). Konflik geopolitik dan perebutan kekuasaan di era globalisasi sangat berkaitan dengan perusahaan internet. Dimensi ekonomi, budaya, ideologi dan politik kerap kali cenderung melibatkan ekonomi industri digital secara simultan. (Huang, Huang, and Miao 2021, 5). Kompetisi dalam cyberspace, bagaimanapun dibatasi oleh dua elemen, yakni ekonomi dan politik (Segal 2013, 40).

Yang pertama adalah politik. AS dan Tiongkok memiliki nilai, ideologi dan pemerintahan yang berbeda. Tiongkok yang memiliki cita-cita untuk menjadi negara cyber hegemon dilandasi dengan ide Four Modernization memiliki empat sektor ambisi Tiongkok di lingkup internasional dalam kemajuan negaranya yaitu dalam sektor industri, agrikultur, pertahanan dan teknologi yang diinisiasi secara tidak langsung oleh Deng Xiaoping. Untuk AS, mereka memiliki dasar Grand Strategy yang merupakan sekumpulan kebijakan dari hasil preferensi dan formulasi yang dikeluarkan oleh presiden AS, sesuai dengan Pasal II Konstitusi dimana presiden memiliki kapabilitas penuh dalam memimpin dan merancang kebijakan yang tepat untuk

negara. Terdapat empat sumbu konflik dalam perpecahan domestic negeri AS pada era pasca Perang Dingin, yaitu;

1. Kelembagaan (Eksekutif vs Kongres)
2. Ideologis (contohnya, liberal vs konservatif)
3. Partisan (Partai Republik vs Demokrat)
4. Komersial (contohnya, kepentingan bisnis internasional vs kepentingan bisnis nasionalis) (Gates and Skidmore 1997, 515).

Pada pemerintahan Obama, terdapat kebijakan *Pivot to Asia* dimana Obama melakukan alokasi sumber daya di beberapa sektor seperti militer, ekonomi hingga politik kawasan Asia-Pasifik. Terdapat beberapa kebijakan seperti mengerahkan sumber diplomasi untuk membangun kerangka perdagangan bebas melalui Trans-Pacific Partnership (Wardhana 2018, 70). Tujuan kebijakan ini juga beragam mulai dari untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan mendominasi kawasan Asia-Pasifik, mengurangi dan secara tidak langsung menolak pengaruh dan dominasi Tiongkok, serta menunjukkan kekuatan baru AS di berbagai sektor. Pivot to Asia menjadi penyeimbang fokus AS yang berat sebelas saat War on Terror di masa George W. Bush yang dominan hard power terkait perlawanan terorisme yang berkepanjangan ke arah isu struktural terkait ekonomi serta perwujudan tatanan internasional yang berfokus pada kawasan Asia-Pasifik (Wardhana 2018, 70-71).

Sementara itu di sektor ekonomi, AS menjadi nomor dua setelah Tiongkok sebagai negara dengan pasar ekspor terbesar, sementara Tiongkok sendiri menjadi negara nomor tiga di AS dan investasi dua arah yang dilakukan apabila ditotalkan lebih dari \$55 miliar di tahun 2012 (Segal 2013, 40). Saat pemerintahan presiden Barack Obama, AS

berusaha mencegah kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan Tiongkok di industri semikonduktor Amerika. Oleh karena itu, AS secara bertahap memperketat akses Tiongkok ke teknologi AS. Dan di bawah pemerintahan Donald Trump, sekuritisasi persaingan teknologi antara AS dan Tiongkok secara resmi terlibat (Kartasasmita and Kurnadi 2020, 170).

Sebelumnya ZTE Corporation pun dilarang bertransaksi dengan perusahaan AS karena adanya keterlibatan ZTE dengan Iran dan Korea Utara terkait teknologi. ZTE menyatakan bersalah dan membayar denda \$1 miliar dan memberi izin kepada komite khusus AS untuk mengawasi agar ZTE mengikuti aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintahan Trump mencabut kebijakan pelarangan ZTE di AS dan diperbolehkan tetap melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan AS (Stolyar and de Looper 2018).

Pada Desember 2018, atas permintaan AS, terjadi penahanan Meng Wanzhou selaku CEO Huawei dengan tuduhan Huawei melakukan penjualan ilegal teknologi AS ke Iran (Musil 2018) yang kemudian melalui Pengadilan Kanada di Vancouver, British Columbia, memutuskan bahwa Wangzhou memenuhi syarat untuk proses ekstradisi ke AS (Kartasasmita and Kurnadi 2020, 161).

Pada 15 Mei, Menteri Perdagangan diberikan mandat oleh Donald Trump lewat penandatanganan Perintah Eksklusif yang menyatakan bahwa Menteri Perdagangan Luar Negeri AS dapat menentukan potensi akan keamanan nasional dan perdagangan luar negeri AS dan memblokir transaksi risiko keamanan nasional yang tinggi (Kartasasmita and Kurnadi 2020, 160).

AS menyatakan bahwa Huawei merupakan perusahaan dibawah militer Tiongkok dan memiliki infrastruktur jaringan yang digunakan untuk melakukan spionase siber (Reichert 2020). Dengan adanya

tuduhan ini, Donald Trump melarang perusahaan AS untuk menggunakan produk buatan Huawei dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, Huawei tidak luput dari daftar blacklist pasar AS di masa Donald Trump dan oleh sebab itu partner dagang Huawei yang ada di AS harus mendapatkan izin terlebih dahulu ke Departemen Perdagangan AS agar dapat melakukan hubungan bisnis. Hal ini pun melemahkan posisi Huawei di sektor bisnis telekomunikasi karena memiliki kerjasama dengan 3 perusahaan besar teknologi mobile AS yaitu Google, Arm dan Qualcomm (Kartasmita and Kurnadi 2020, 161). Dan hal tersebut semakin memburuk setelah administrasi Trump memperpanjang *executive bill* hingga tanggal 23 Mei 2021 (Heater 2020).

Pelarangan Huawei ini diambil sebagai respon atas konflik perang dagang dengan Tiongkok serta kekhawatiran atas pemerintah Tiongkok yang menggunakan Huawei sebagai alat untuk memata-matai AS dikarenakan adanya spekulasi perusahaan teknologi Tiongkok memiliki hubungan dengan dinas intelijen dan pemerintahnya. Hal tersebut diperkuat dengan lingkungan politik dan hukum Tiongkok yang mana sebuah perusahaan memerlukan kerjasama dengan pemerintah agar dapat berjalan lancar di perdagangan global.

Kapasitas teknologi 5G yang menjadi bukti kemajuan perusahaan Tiongkok yang diaplikasikan ke Huawei dikhawatirkan akan memberikan ketergantungan kepada pengguna di AS dan berpotensi akan dikendalikan oleh dinas intelijen dan militer Tiongkok. Larangan Huawei ditanggapi oleh pendiri Huawei, Ren Zhengfei yang menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan sistem operasinya sendiri jika kehilangan akses ke Android. Ia juga menyatakan perusahaan telah mengantisipasi kemungkinan kehilangan akses ke perusahaan Amerika (Hosain 2019, 22).

Untuk kasus pelarangan TikTok, terdapat beberapa poin yang melandasi kecurigaan AS agar lebih meningkatkan pengawasan dan keamanan dengan ditambahkan kondisi geopolitik AS-Tiongkok yang memanas. Yang pertama, Tiongkok memiliki UU mengenai data apa saja yang diberikan akses penuh oleh perusahaan kepada pemerintah tanpa terkecuali. Kedua, terdapat laporan bahwa konten yang telah tersebar yang dipandang sensitive oleh pemerintah Tiongkok, dihapus tanpa diketahui. Ketiga, pemerintah AS melakukan tinjauan terhadap keamanan nasional terkait perusahaan dan pemiliknya dengan dasar kekhawatiran akan sensor politik dan bagaimana data pengguna disimpan. (DeVoe 2019).

Dalam pernyataan eksklusif Donald Trump pada 6 Agustus yang dirilis oleh [whitehouse.com](https://www.whitehouse.com), TikTok dilaporkan menyensor konten seperti peristiwa protes di Hongkong, dan perilaku Tiongkok terhadap Uighur serta minoritas Muslim lainnya yang dianggap sensitif secara politik oleh Partai Komunis China; “TikTok also reportedly censors content that the Chinese Communist Party deems politically sensitive, such as content concerning protests in Hong Kong and China's treatment of Uyghurs and other Muslim minorities.” (The White House 2020)

### **Penyediaan Cloud Secure, Pembelian Saham dan Perbedaan Kesepakatan**

Pada bulan September 2020, sesuai opsi yang diberikan Donald Trump, terdapat 2 perusahaan yang ingin melakukan kerjasama dengan ByteDance yakni Microsoft dan Oracle untuk menghindari pelarangan TikTok. Microsoft yang pertama kali mengajukan diri untuk membeli operasi TikTok ditolak oleh ByteDance dalam penjelasan Microsoft website resmi mereka yang dirilis pada tanggal 13 September 2020 (Microsoft Corporate Blogs 2020). Sementara itu, Oracle sendiri berhasil melakukan kesepakatan dengan ByteDance

dan diumumkan pada tanggal 20 September 2020 dalam website mereka jika mereka terpilih menjadi penyedia cloud secure TikTok dan menjadi minoritas investor dengan saham sebesar 12,5% (Oracle 2020) dan Trump menanggapi dengan baik kesepakatan tersebut. Sebagai minoritas pemegang saham serta penyedia cloud secure, penggunaan cloud milik Oracle dalam penyimpanan data, campur tangan dengan pemerintah, menjadi sebuah langkah agresif dari AS untuk melindungi keamanan nasional dan infrastruktur negara.

*Chief Technology Officer Oracle*, Larry Ellison mengatakan TikTok memilih Oracle karena Oracle memiliki infrastruktur *Cloud* generasi 2 terbaru yang lebih cepat, lebih andal dan lebih aman dibandingkan dengan teknologi generasi pertama yang ditawarkan oleh penyedia *cloud* besar lainnya. Oracle IaaS (*Infrastructure as a Service*) mendapat skor kepuasan tertinggi dalam survei Industry Cloudpath 2020 yang dirilis oleh IDC (International Data Corporation) dimana terdapat 935 pelanggan IaaS terkait kepuasan mereka termasuk Amazon Web Service, Microsoft, IBM, dan Google Cloud. CEO Oracle Safra Catz menyatakan TikTok akan berjalan di Oracle Cloud dan Oracle menjadi investor minoritas di 50 TikTok Global. Ia juga menjamin akan memberikan lingkungan yang sangat aman dan memastikan privasi data bagi pengguna TikTok di AS serta seluruh dunia. Dalam press release di website Oracle tersebut itu juga dikatakan Cloud Oracle Generasi 2 dibangun dari bawah ke atas untuk sepenuhnya mengisolasi aplikasi yang berjalan dan secara mandiri merespon ancaman keamanan. Oracle akan menggabungkan teknologi cloud amannya dengan tinjauan kode, pemantauan, dan audit berkelanjutan untuk memberikan jaminan yang belum pernah ada sebelumnya bahwa data pengguna TikTok AS bersifat pribadi dan aman (Oracle 2020).

Keinginan ByteDance untuk mengontrol penuh TikTok tidak hanya berdasar sepenuhnya aplikasi milik mereka. Dikutip dari CNBC

(21/09/2020) hal ini dikarenakan investor dan perusahaan Tiongkok memiliki persentase besar di TikTok dan memiliki suara di dewan perusahaan di AS yang bernama TikTok Global. Pernyataan Donald Trump bahwa Pracle akan mengendalikan penuh TikTok adalah hal yang tidak benar dikarenakan menurut pernyataan Wakil Presiden Eksekutif Oracle, Ken Glueck setelah pernyataan tersebut ialah “saham TikTok akan didistribusikan kepada pemiliknya setelah berdirinya TikTok Global dan investasi yang dilakukan oleh Oracle. Orang Amerika akan menjadi mayoritas dan ByteDance tidak akan memiliki kepemilikan di TikTok Global”. Dari pernyataan ini disimpulkan, dalam TikTok Global tidak ada kekuatan yang mendominasi baik antara AS maupun Tiongkok (Kovach and Boorstin 2020).

ByteDance dan Oracle mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang akan memenuhi permintaan Trump akan dijual ke perusahaan Amerika atau kemungkinan terburuk adalah dilarangnya TikTok di AS. Akan tetapi kedua belah pihak justru membingkai kesepakatan dengan kacamata yang berbeda dalam pernyataan publik.

Dalam pandangan Oracle terdapat beberapa poin yang mereka lihat dalam kesepakatan yang dilakukan, yakni;

- a. Empat dari 5 kursi dewan di TikTok Global akan diduduki oleh warga AS,
- b. 53% saham TikTok Global akan dipegang oleh investor AS apabila dihitung dengan perusahaan modal ventura AS seperti Sequoia, Tiger Management, dan General Atlantic. Hal ini diperbincangkan karena modal aktual yang mereka investasikan tidak perlu berbasis di AS dan dapat berasal dari mitra luar, walaupun investor ventura sering melakukan

kontrol atas perusahaan yang mereka gunakan sebagai tempat investasi

- c. Oracle melihat pemegang saham individu ByteDance sebagai pihak yang berkepentingan, bukan sebagai entitas yang memiliki saham di TikTok Global.
- d. Perusahaan-perusahaan AS mengatakan bahwa mereka akan membeli TikTok Global dengan dasar adanya mayoritas orang AS di kursi dewan direksi karena pihak-pihak tersebut akan menjadi “penenang” pemerintahan Trump untuk tidak melarang TikTok beroperasi di AS (Reuters 2020).

Sementara itu, ByteDance melihat kesepakatan ini;

- a. ByteDance tidak memisahkan investor modal ventura Amerika dari pemangku kepentingan sehingga dapat dikatakan ByteDance akan memiliki 80% dari TikTok Global jika kesepakatan berhasil dan TikTok Global akan menjadi anak perusahaannya di AS,
- b. CEO dari pendiri ByteDance, Zhang Yiming, akan memiliki kursi dewan di TikTok Global yang otomatis memberikan kekuasaan bagi ByteDance untuk memberikan sudut pandang dalam hal; tata kelola, walau ia kalah jumlah dalam kursi dewan.

Untuk saat ini , Oracle dapat melihat kode sumber TikTok dan memblokir pembaharuan yang terlihat bermasalah dari sudut pandang keamanan serta menjamin penyedia *cloud secure* yang sebelumnya telah bermitra kontrak *Cloud* dengan Zoom akan menggunakan kesepakatan dengan TikTok sebagai media lain untuk menyediakan layanan keamanan dan cloud (Kovach and Boorstin 2020) dan ByteDance tetap memegang kendali teknologi algoritma TikTok yang

berguna dalam mengatur video yang direkomendasikan sebagai kunci kepopuleritasan aplikasi (Kovach and Boorstin 2020). Meskipun Oracle memiliki saham dengan persentase yang cukup besar, pemegang kendali penuh terutama dalam algoritma TikTok Global selaku anak perusahaan tetap di tangan ByteDance. Masih terdapat negosiasi saat pemilik TikTok di Tiongkok yang mengirimkan proposal ke Departemen Keuangan AS yang mana negosiasi terhambat dalam detail kesepakatan, kontrol algoritma yang dapat menampilkan konten tertentu.

## **Kesimpulan**

Dengan adanya perbedaan pandangan dalam melihat kesepakatan yang ada, kebijakan pelarangan ini terus ditunda dikarenakan berhimpitan dengan agenda pemilihan presiden Amerika Serikat yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2020. Kebijakan pelarangan ini pun berlanjut hingga ke masa pemerintahan Joe Biden. Pelarangan aplikasi TikTok pun terus diundur dan ditunda seiring menyusun persyaratan dari kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Mengutip dari Bloomberg yang dikutip oleh New York Post (02/10/2020), ByteDance masih dalam proses menyusun proposal dengan Komite Investasi Asing di AS dan Oracle sendiri masih berusaha menyelesaikan persyaratan dari kesepakatan tersebut (Manskar 2020).

Permasalahan mengenai kesepakatan tersebut terkait dengan kesepakatan kepemilikan Tiongkok atas TikTok Global, pernyataan keamanan data, dan kemungkinan pembentukan dana pendidikan yang telah diminta oleh Trump sebelumnya apabila TikTok akan beroperasi kembali setelah kesepakatan dicapai. Permasalahan ini pun berlanjut hingga ke masa pemerintahan Joe Biden.

Di era globalisasi ini, keamanan menjadi sebuah isu yang sama pentingnya dengan ekonomi, politik, keamanan militer, dan lain sebagainya karena merupakan hal yang sangat rentan terancam. Sekuritisasi yang dulu dikenal sebagai ancaman objektif akhirnya berkembang dan memberikan pandangan baru bahwa terdapat ancaman subjektif.

Tiongkok menjadi sebuah negara yang menduduki posisi negara hegemon ekonomi dunia. Dan Tiongkok kini ingin menjadi sebuah negara *cyber hegemon* memungkinkan adanya rivalitas dengan AS. Kemunculan TikTok yang menjamur di AS dengan jumlah pengguna yang masif, memberikan ancaman tersendiri bagi AS. Lewat *speech act* yang dilakukan oleh Mike Pompeo dan Presiden Donald Trump menyatakan TikTok sebagai bentuk dari ancaman keamanan nasional bagi AS karena kecurigaan pencurian data pribadi warga AS pengguna TikTok, TikTok pun terancam untuk dilarang dari AS.

### **Daftar Pustaka**

- Bartz, Diane, and Alexandra Hudson. 2021. "Bill to ban TikTok on U.S. government devices passes committee." Reuters. <https://www.reuters.com/technology/bill-ban-tiktok-us-government-devices-passes-committee-2021-05-12/>.
- DeVoe, Robert. 2019. "Is TikTok Secretly Sending Your Private Data to China?" ScreenRant. <https://screenrant.com/tiktok-secretly-sends-data-china-lawsuit/>.
- Finnegan, Conor, Catherine Thorbecke, and Karson Yiu. 2020. "US looking at banning Chinese social media app TikTok as security threat: Pompeo." ABC News. <https://abcnews.go.com/Politics/us-banning-chinese-social-media-app-tiktok-security/story?id=71647269>.

- Fung, Brian. 2020. "TikTok is a national security threat, US politicians say. Here's what experts think." CNN. <https://edition.cnn.com/2020/07/09/tech/tiktok-security-threat/index.html>.
- Gates, William, and David Skidmore. 1997. "After Tiananmen: Tahe Striggel over U.S Policy toward China in the Bush Administration." *Presidential Studies Quarterly* 27:514-539.
- Hadiwinata, Sugeng B. 2017. *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hayoung, Sun. 2019. "The U.S.-China Tech War: Impacts and Prospects." *China Quarterly of International Strategic Studies* V (02): 197-212. 10.1142/S237774001950012X.
- Hayoung, Sun. 2019. "The U.S.-China Tech War: Impacts and Prospects." *China Quarterly of International Strategic Studies* V (02): 197-212. 10.1142/S237774001950012X.
- Heater, Brian. 2020. "Trump adds another year to Huawei/ZTE ban." Techcrunch+. [https://techcrunch.com/2020/05/14/trump-adds-another-year-to-huawei-zte-ban/?guce\\_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlL&guccounter=1](https://techcrunch.com/2020/05/14/trump-adds-another-year-to-huawei-zte-ban/?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlL&guccounter=1).
- Hosain, Md S. 2019. "Huawei ban in the US: Projected consequences for internationaltrade." *International Journal of Commerce and Economics* 1, no. 2 (April): 22-25.
- Kartasmita, Giandi, and Andrea P. Kurnadi. 2020. "The Securitization of Chinese Technology Companies in the United States of America." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*

XVI, no. 2 (December): 159-178.

Kelion, Leo. 2020. "TikTok: Oracle confirms being picked by Bytedance to be app's partner." BBC. <https://www.bbc.com/news/technology-54148684>.

Kovach, Steve, and Julia Boorstin. 2020. "TikTok deal splits control between US and Chinese owners." CNBC. <https://www.cnbc.com/2020/09/21/tiktok-deal-splits-control-between-us-and-chinese-owners.html>.

Kurnia, Novi. 2005. "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi terhadap Teori Komunikasi." *MediaTor* VI, no. 2 (December): 291-296.

Kusumawardhani, Elisa, and Deasy S. Sari. 2021. "Gelombang Pop Culture TikTok: Studikamus Amerika Serikat, Jepang, India dan Indonesia." *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* III (January): 19-31.

Manskar, Noah. 2020. "Final TikTok deal could be delayed until after November election." New York Post. <https://nypost.com/2020/10/02/final-tiktok-deal-could-be-delayed-until-after-november-election/>.

Microsoft Corporate Blogs. 2020. "Microsoft statement on TikTok – The Official Microsoft Blog." The Official Microsoft Blog. <https://blogs.microsoft.com/blog/2020/09/13/microsoft-statement-on-tiktok/>.

Musil, Steven. 2018. "Huawei executive arrested in Canada at US request." CNET. <https://www.cnet.com/news/huawei-executive-arrested-by-canadian-officials-at-us-request/>.

Musil, Steven. 2020. "TikTok ban won't prevent employees from being paid, US says in filing." CNET. <https://www.cnet.com/tech/mobile/tiktok-ban-wont-prevent-employees-from-being-paid-us-says-in-filing/>.

Oracle. 2020. "Oracle Chosen as TikTok's Secure Cloud Provider." Oracle. <https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-chosen-as-tiktok-secure-cloud-provider-091920/#:~:text=Oracle%20Corporation%20%28NYSE%3A%20ORCL%29%20announced%20today%20that%20it%20video%20conferencing%20capacity%20to%20the%20Oracle%20Public%20Cloud.>

Reichert, Corinne. 2020. "US finds Huawei has backdoor access to mobile networks globally, report says." CNET. <https://www.cnet.com/tech/mobile/us-finds-huawei-has-backdoor-access-to-mobile-networks-globally-report-says/>.

Reuters. 2020. "China unlikely to OK 'unfair' TikTok deal, state-run paper says." NBC News. <https://www.nbcnews.com/news/world/china-unlikely-approve-tiktok-deal-oracle-walmart-state-owned-paper-n1240676>.

Ross, Andrew L. 2014. "The Arms Dynamic in World Politics. By Barry Buzan and Eric Herring. Boulder," Book Review. *American Political Science Review* ed. No. 3. Cambridge University Press.

Segal, Adam. 2013. "The code not taken: China, the United States, and the Future of cyber espionage." *Bulletin of the Atomic Scientists*, (September), 38-45. 10.1177/0096340213501344.

- Singer, Peter W., and Allan Friedman. 2014. *Cybersecurity: What Everyone Needs to Know*. United States of America: OUP USA.
- Stolyar, Brenda, and Christian de Looper. 2018. "ZTE and the US: Everything You Need to Know." Digital Trends. <https://www.digitaltrends.com/mobile/commerce-bans-zte-from-exporting-technology-from-the-us/>.
- Susanto, Eko H. 2017. "Media Sosial sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik." *Jurnal ASPIKOM III* (July): 379-398..
- TikTok Company. 2020. "Why we are suing the Administration | TikTok Newsroom." Newsroom | TikTok. <https://newsroom.tiktok.com/en-us/tiktok-files-lawsuit>.
- Wardhana, Agastya. 2018. "Grand Strategy Obama: Pivot to Asia." *Global & Strategis*, 59-77.
- The White House. 2020. "Executive Order on Addressing the Threat Posed by TikTok." The White House Archive. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-addressing-threat-posed-tiktok/>.
- The White House. 2020. "Text of a Letter to the Speaker of the House and President of the Senate on Addressing the Threat Posed by TikTok." Trump White House Archive. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/text-letter-speaker-house-president-senate-addressing-threat-posed-tiktok/>.
- Wilde, Jaap d., Research Professor of International Studies Centre for the Study of Democracy B. Buzan, Barry Buzan, Ole Wver, and Ole Wæver. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. N.p.: Lynne Rienner Pub.

William, Paul D. 2011. "The Evolution of International Security Studies. By Barry Buzan and Lene Hansen." Cambridge University Press. William, Paul D. 2011. "The Evolution of International Security Studies. By Barry Buzan and Lene Hansen." Book Review. Perspectives on Politics ed. No. 1. Cambridge University Pres